

NASIONALISME,
ETNISITAS, PERUBAHAN
SOSIAL DAN INTEGRASI

LAPORAN AKHIR PENELITIAN KEBIJAKAN FAKULTAS



**ORIENTASI POLITIK PEMILIH MUDA
DALAM MERESPON DINAMIKA DEMOKRASI POLITIK
(STUDI PADA PEMILIH MUDA DI JAWA TIMUR)**

TIM PENGUSUL

| | |
|--|------------|
| Maya Mustika Kartika Sari, S. Sos. M.IP. | 0014057403 |
| Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si. | 0025086704 |
| Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si | 0016087208 |

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOPEMBER, 2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Orientasi Politik Pemilih Muda Dalam
Merespon Dinamika Demokrasi Politik (Studi
Pada Pemilih Muda Di Jawa Timur)

Bidang Ilmu Penelitian : Pendidikan

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos. M.IP
b. NIDN : 0014057403
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
e. Nomor HP : 081332207020
f. Alamat Surel (e-mail) : maya_mstk@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si
b. NIDN : 0025086704
c. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si
b. NIDN : 0016087208
c. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Mahasiswa yang terlibat : 5 Orang

Biaya Tahun Berjalan :
(diusulkan ke PT) : Rp 13.000.000,00

Sumber Lain : -

Surabaya, 20 Nopember 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Hukum



Prof. Dr. Sarmini, M.Hum
NIP. 196808081993032002

Ketua Peneliti,

Maya Mustika K.S, S.Sos. M.IP
NIP. 197405142003122002

Menyetujui,
Ketua LPPM Unesa,



Prof. Dr. Lies Ann Lestari, M.A., M.Pd
NIP. 196102121988032004

RINGKASAN

Pemilih muda merupakan sasaran utama partai-partai politik yang mengikuti pemilu di Indonesia. Jumlah pemilih muda hampir sepertiga dari keseluruhan warganegara yang mempunyai hak memilih. Antara pemilih dewasa dan pemilih muda memiliki karakteristik yang berbeda, karakteristik pemilih pemula an-tara lain ditandai dengan orientasi politiknya belum *ajeg*, sehingga mudah dipengaruhi. Penelitian ini melakukan kajian tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan serta kecakapan partisipatoris pemilih pemula di Jawa Timur. Penelitian akan dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data-data dari hasil angket, ditabulasi dan dikategorikan serinci mungkin sehingga menjadi suatu acuan data yang sistematis. Semua data kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif sehingga apa yang terkandung dibalik realitas data dapat tersaji secara ilmiah. Pengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu dalam rangka penginterpretasian data sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah penelitian yang akhirnya akan diinterpretasikan dan disimpulkan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemilih muda di Jawa Timur secara umum memiliki pengetahuan politik yang cukup baik terkait

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kegiatan penelitian dan laporan penelitian yang berjudul *Orientasi Politik Pemilih Muda Dalam Merespon Dinamika Demokrasi Politik (Studi Pada Pemilih Muda Di Jawa Timur)* dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan Penelitian ini dapat dilaksanakan berkat dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Jajaran dekanat, Ketua Lembaga Penelitian UNESA beserta staff, yang telah memberikan dukungan sarana, prasarana, dan bantuan pengelolaan administrasi.
2. Para Mahasiswa yang bersedia menjadi bagian dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari banyak kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan dan laporan kemajuan penelitian ini, karena itu kami membutuhkan kritik dan saran bagi penyempurnaannya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Surabaya,

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

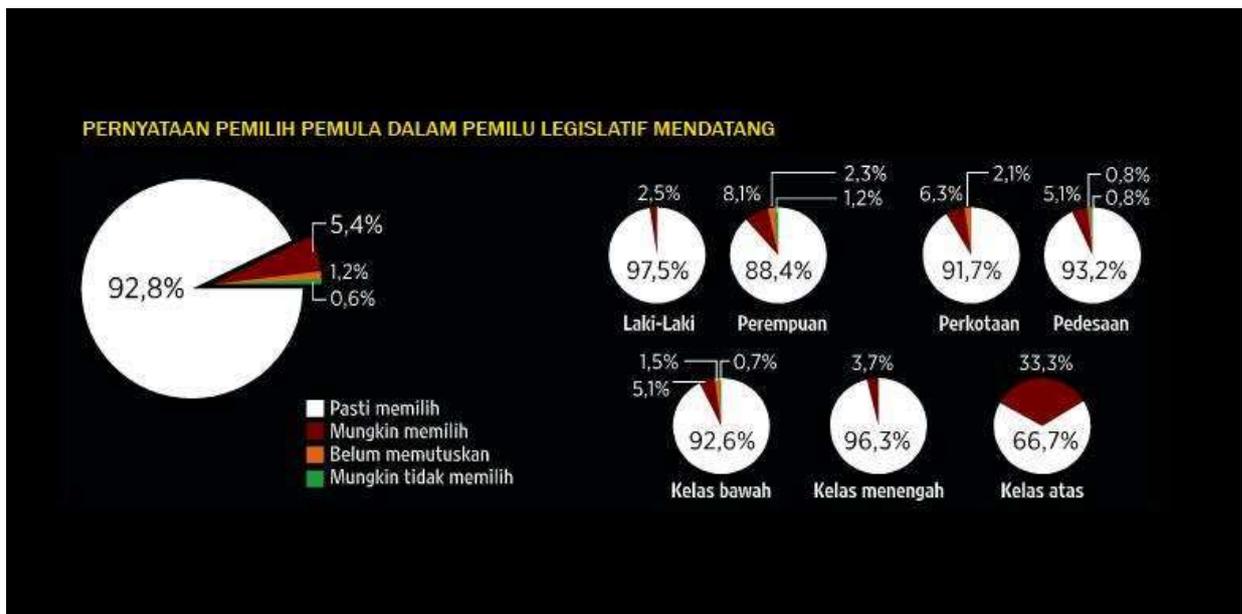
| | Hal |
|--------------------------------------|------------|
| HALAMAN SAMPUL | 1 |
| HALAMAN PENGESAHAN | 2 |
| RINGKASAN | 3 |
| PRAKATA | 4 |
| DAFTAR ISI | 5 |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 6 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN | 23 |
| BAB 4. METODE PENELITIAN | 24 |
| BAB 5. HASIL YANG DICAPAI | 27 |
| BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN | 33 |
| DAFTAR PUSTAKA | 35 |
| LAMPIRAN | 37 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilih muda merupakan sasaran utama partai-partai politik dalam menjaring konstituen yang mengikuti pemilu di Indonesia. Hal tersebut merupakan fenomena yang lazim ditemui sebagai bagian dari proses rekrutmen politik. Pemilih muda adalah kelompok masyarakat yang potensial dalam sosialisasi dan rekrutmen politik, karena sirkulasi kekuasaan dalam sistem politik Indonesia ditentukan oleh kehendak mayoritas yang secara prosedural diperoleh melalui proses pemilu. Jumlah pemilih muda pada tahun 2019 nanti, mencapai 70-80 juta dari sekitar 193 juta pemilih atau mencapai 35-40 persen dari jumlah pemilih (Republika.co.id, 18 Maret 2018). Ditinjau dari Antara pemilih dewasa dengan pemula memiliki karakteristik yang berbeda, karakteristik pemilih pemula antara lain ditandai dengan orientasi politiknya belum ajeg, sehingga mudah dipengaruhi. Hal ini terjadi karena mereka belum memiliki pengalaman dan keca-kapan partisipatoris yang memadai, akibatnya kualitas pilihan politiknya bisa dikategorikan rendah. Hal ini akan berdampak pada rendahnya kualitas pemilu di negara kita.



Gambar 1. Sikap Pemilih Pemula dalam Pemilu Legislatif

Sesungguhnya warganegara dan masyarakat yang demokratis mempunyai hak untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan pemahaman yang memadai, sehingga mereka memiliki kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dan bertanggungjawab secara cerdas terhadap pilihannya.

Di alam demokrasi sekarang ini warganegara tidak cukup hanya memiliki pengetahuan politik dengan segala aspeknya, tetapi dituntut pula memiliki ke-cakapan-kecakapan intelektual yang secara kritis dipraktikkan seperti kecakapan mendengar, mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, menilai dan meng-kreasi persoalan-persoalan politik yang menjadi isu-isu publik. Selain itu, warga-negara dituntut memiliki kecakapan partisipatoris antara lain kecakapan ber-interaksi untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya, memonitor isu-isu publik bahkan diharapkan cakap mempengaruhi kebijakan publik.

Menurut data KPU dalam pemilu 2019 yang akan datang diperkirakan sekitar 69 juta (Antara – 20 Juni 2012) adalah pemilih pemula. Keberadaan pemilih pemula sering dikaitkan dengan keberhasilan partai politik dalam meraih simpati, sehingga partai yang bersangkutan mampu meraih suara yang tinggi dalam pemilu. Namun keberha-silan itu belum tentu ditunjang oleh perilaku pemilih yang menentukan pilihannya secara cerdas, karena berdasarkan data KPU menunjukkan bahwa pemilih pemu-la baik yang pernah menggunakan pilihnya maupun yang belum menggunakan pilihnya pada pemilu 2009 cenderung memilih partai-partai besar dan lama men-jadi peserta pemilu yang telah meraih kursi cukup besar di parlemen. Selain itu, pilihan pemilih pemula lebih didasari oleh ketokohan, populeritas dan sentimen primordial.

Berdasar pilihan pemilih pemula nampaknya proses politik yang mereka lakukan belum didasari oleh kesadaran yang rasional, sehingga pemilu hanya menghasilkan perputaran elite-elite politik yang tetap dan proses regenerasi kepemimpinan politik sering dianggap gagal. Elite politik hanya berputar diantara pengurus partai, karena partai politikpun belum punya keberanian melamar dan mencalonkan elite di luar partai.

Yang memprihatinkan ialah sebagian besar pemilih pemula tidak menggu-nakan hak pilihnya, hal ini dikhawatirkan terjadi pada pemilu 2019 apalagi kondisi ini lebih disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada pemilih pemula yang kurang maksimal (DIPA BPNP, 2009:3). Kondisi yang terjadi pada pemilih pemula kalau terus dibiarkan akan menghambat proses peningkatan kualitas demokrasi yang sedang dibangun di negara kita, karena bagaimanapun demokrasi membutuhkan pemilih yang cerdas untuk

berpartisipasi. Sebagaimana pendapat Huntington (1982:56) bahwa model demokrasi terbaik meliputi tiga tahap substansial, yakni tahap pertama perumusan dan pengembangan identitas nasional, tahap kedua pengembangan pranata atau kelembagaan politik yang efektif, dan tahap ketiga partisipasi politik. Dari kondisi ini pemilih pemula harus didorong agar dapat memposisikan dirinya sebagai pemilih yang memiliki kecakapan partisipatoris, karena bagaimanapun juga mereka merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu mengembangkan budaya politik karena sikap politiknya. Sebagaimana diungkapkan Mannheim (dalam Seymour, 2007:174) “pengalaman khusus dalam usia yang khusus menciptakan pemahaman politik yang sangat menentukan di dalam melihat mengalami-pengalaman politik di masa yang akan datang”. Untuk itu, diperlukan pendidikan politik yang memadai dalam menciptakan kecakapan partisipatoris pada pemilih pemula, sehingga partisipasi yang mereka lakukan merupakan partisipasi aktif.

Dengan adanya pemilih pemula yang cakap, akan merubah pendirian pemilih pemula untuk menolak kebiasaan partai politik yang selama ini hanya memanfaatkan mereka dalam mobilisasi massa dalam kampanye untuk menjaring massa, dengan memberikan uang saku, kaos agar mereka terlibat dalam politik. Dari kecakapan pemilih pemula yang mampu menolak dimobilisasi akan memberikan umpan balik bagi parpol dalam menentukan model sosialisasi politik. Sejalan dengan pendapat Manbridge dalam *Participation and Democratic Theory* (CICED. 2002;147) dikatakan bahwa “... *the major function of participation in theory of participatory democracy is ..an educative one, educative in a very widest sense*”.. yakni bahwa fungsi utama dari partisipasi dalam pandangan teori demokrasi partisipatif adalah bersifat edukatif dalam arti yang sangat luas. Hal ini dinilai sangat penting, karena dalam partisipasi demokrasi akan mampu mengembangkan kepribadian yang demokratis.

Politik adalah tempat "ada bersama" (being-together) individu-individu sebagai warga sekaligus subyek, yang melaluinya disusun gagasan, dijalankan misi, dibangun nasib, direlakan pengorbanan, diukir sejarah, dan dirangkai makna bersama. Di dalam ruang bersama itu dibangun simpul-simpul (knots) yang mengikat individu-individu sebagai komunitas. Ruang itu adalah dialektika antara interioritas—yaitu makna-makna bersama yang diinternalisasikan para aktor politik—dan eksterioritas—yaitu makna individual yang disumbangkan untuk "ruang bersama" (Jean-Luc Nancy, 1993).

Di dalam komunitas, setiap individu diikat oleh simpul-simpul bahasa, tindakan, perilaku, pernyataan, dan makna, yang diekspresikan melalui aneka media puisi, slogan,

moto, atribut, atau lagu. Politik adalah perangkaian ucapan, tindakan, dan pernyataan menjadi simpul, yang secara terus-menerus disimpul ulang melalui dialektika kekuatan individu dan komunitas. Politik adalah tegangan antara dua kekuatan ini. Tanpa simpul, komunitas politik tak lebih dari kerumunan individu tanpa ikatan nilai bersama.

Karena itu, individu sebagai warga harus ditransformasikan menjadi subyek melalui proses "subyektifikasi", yaitu produksi serangkaian tindakan, ungkapan, dan ekspresi di dalam medan pengalaman yang ada, tetapi mampu mere-konfigurasi medan pengalaman itu, dengan menawarkan nilai pengalaman baru dalam konstelasi politik yang terus berubah. Melalui komunitas politik inilah, "yang tak dihitung" di dalam wacana politik menemukan ruang eksistensinya (Ranciere, 1995).

Ruang politik adalah arena yang di dalamnya berlangsung pertarungan ideologis di antara komunitas-komunitas politik memperebutkan posisi hegemoni dalam pasar politik. Setiap kelompok politik—khususnya parpol—mengerahkan segala bentuk modal ideologis, ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik untuk memenangi pertarungan. Inilah dramaturgi politik, di mana setiap elemen politik menampilkan segala gestur politik sebagai jalan mencapai hegemoni politik.

Akan tetapi, yang terjadi kini adalah semacam desubjektivisme politik, yaitu ketika ruang pertarungan hegemoni di antara komunitas-komunitas politik melalui arena dramaturgi politik diambil alih oleh pertarungan kekuasaan di antara individu di dalam arena di belakang layar politik, yang tak tampak dan tak terakses publik. Arena politik telah beralih dari pertarungan hegemoni di ruang publik menjadi pertarungan tak-tampak di antara individu di dalam internal parpol sendiri—*the invisible political arena*.

Eksterioritas pertarungan ideologi di antara parpol—di mana "hadir bersama" dimaknai sebagai perjuangan bersama membangun tanda, makna, dan nilai bersama—kini menjelma jadi interioritas pertarungan kekuasaan di antara aktor-aktor di dalam institusi politik itu sendiri, di mana mereka mengerahkan segala trik dan tipu daya untuk menggapai kekuasaan di dalam retakan komunitas politik, dengan meminggirkan ideologi, dan kalau perlu menyingkirkan kawan sendiri. Kekuasaan adalah masa depan ideologi kita. Oleh karena pentingnya untuk memahami orientasi politik bagi pemilih muda dalam mengembangkan budaya politik, dan sikap politik.

Dalam konteks kontribusi riset terhadap pembangunan nasional, penelitian orientasi politik pemilih muda, berkaitan dengan tema penelitian kompetitif nasional terkait

tema riset pembangunan dan penguatan sosial budaya, hal ini selaras dengan rencana induk penelitian prodi PPKn yang meliputi :

1. Penguatan identitas nasional sebagai modal sosial bangsa
2. Penguatan dan pengembangan integrasi bangsa
3. Penguatan dan pengembangan keterlibatan/partisipasi warga negara dalam kebijakan publik
4. Penguatan dan pengembangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang kontekstual.

B. Permasalahan

Bertolak dari latar belakang masalah penelitian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji tentang :

1. Bagaimana pengetahuan politik pemilih pemula dalam memahami realitas politik.
2. Bagaimana sikap politik pemilih pemula dalam merespon dinamika sistem politik demokratis.
3. Bagaimana kecakapan politik pemilih pemula dalam merespon dinamika sistem politik demokratis.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Berbicara mengenai politik, demikian lazimnya anggapan orang adalah berbicara mengenai naluri kekuasaan yang dibenarkan secara sosial. Politik dalam arti seluas-luasnya adalah dimensi kekuasaan yang mengatur dan mengarahkan kehidupan sosial sebagai keseluruhan. Sebagai alat konstruksi sosial, politik tidak bisa terpisahkan dari kehendak kehidupan sosial masyarakat sebagai bagian dari kehendak kemanusiaan secara universal. Kecenderungan memisahkan politik dan kekuasaan dari kehendak masyarakat akan mengakibatkan hilangnya legitimasi kekuasaan itu sendiri.

Politik tidak hanya membutuhkan legitimasi. Meskipun lewat legitimasi politik mendapat segi kognitifnya, namun politik tetap saja irasional. Politik membutuhkan pijakan epistemologis. Sekurang-kurangnya dewasa ini kecenderungan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan rasional bagi keputusan kehendak politik itu menunjukkan gejala yang di sebut Jurgen Habermas sebagai “peng-ilmiahan politik”. Masyarakat sebagai investor terbesar dalam memberikan legitimasi mestinya diberi modal sosial yang mapan dalam menyeimbangi dimenasi kekuasaan yang lahir dari proses-proses politik.

Adalah *Civil Society* oleh Saiful Mujani diidentifikasi sebagai modal sosial yang terdiri dari dua unsur - sikap saling percaya antar sesama warga dan jaringan keterlibatan dalam kehidupan kewargaan – untuk menggambarkan suatu masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang cukup mampu mengimbangi kekuasaan negara.

Pentingnya penguatan *Civil Society* sebagai modal sosial terletak pada asumsi bahwa demokrasi menuntut keterlibatan warga dalam aktifitas sosial, dan penegasan pentingnya penguasaan masyarakat dalam memberikan nilai terhadap berbagai regulasi negara, apakah kehendak politik tersebut memiliki muatan kognitif ataukah lebih cenderung pada temperamen politik yang dominan.

Sejauh melemahnya struktur masyarakat non pemerintahan akan semakin berpeluang terciptanya hierarki politik-ekonomi-ideologi tunggal yang tidak mentolerir adanya rivalitas kekuasaan. Meski demikian, *Civil Society* tidak dimaksudkan untuk menghalangi negara dari peranannya sebagai penjaga perdamaian dan wasit diantara berbagai kepentingan besar, tapi dapat menghalangi negara dari perlakuan mendominasi dan mengatomisasi masyarakat.

Semakin menguatnya ketahanan masyarakat dalam bentuk *Civil Society* negara akan merasa perlu untuk menciptakan ruang publik yang terbuka, seperti memperbanyak riset-riset yang dibiayai pemerintah dan pertimbangan-pertimbangan ilmiah yang mendasari lahirnya kebijakan-kebijakan publik. Dengan demikian negara semakin kuat nilai legitimasinya diluar legitimasi dalam bentuk-bentuk formal saja, sebab memang Negara atau kekuasaan memerlukan legitimasi agar dapat efektif bagi semua pihak. Kekuasaan harus tampak benar dihadapan pihak-pihak yang dikuasai. Dari sinilah akan lahir sebuah siklus dari keinginan rasionalisasi kekuasaan menuju proses pengilmiahan politik.

Pengilmiahan politik pada gilirannya mengangkat isu demokrasi dalam arti bentuk-bentuk komunikasi umum dan publik yang bebas dan terjamin secara institusional. Komunikasi umum tersebut bukan hanya dalam perspektif institusi politik formal, namun menyangkut seluruh lapisan kehidupan sosial yang memungkinkan untuk membentuk opini-opini publik dalam melakukan transformasi dan penguatan terhadap kepuasan demokrasi masyarakat. Yang diharapkan kemudian adalah kritisisme dunia ilmiah yang dapat diterapkan dalam dunia politis. Sebab demokrasi tidak hanya sebatas faktualisasi massa dengan sarana pemungutan suara yang itu masih jauh dari konsep demokrasi dalam arti diskusi rasional diantara masyarakat untuk mencapai sebuah konsensus rasional bebas dominasi.

Dalam esainya tentang *The Scientization of Politics and Public Opinion*, Jurgen Habermas melihat rasionalisasi kekuasaan sebagai menifestasi dari pengilmiahan politik. Ukurannya terletak pada sejauhmana kemesraan antara relasi kekuasaan politik dan kelompok intelektual yang mapan. Lebih banyaknya ruang komunikasi timbal balik antara kelompok intelektual dan penguasa pada gilirannya memungkinkan para intelektual tersebut memberikan nasihat ilmiah untuk peng-ambilan keputusan politik menurut kebutuhan-kebutuhan praktis. Setidaknya lewat relasi-relasi seperti itulah akan ikut melahirkan watak politik yang cenderung memiliki keabsahan intelektual.

Kekuasaan politik yang ditentukan oleh diskusi publik yang kritis merupakan kekuasaan politik yang dirasionalisasikan. Diskusi ini hanya mungkin dilakukan di dalam suatu wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Dalam dunia politik dan publik yang terjadi bukan komunikasi bebas dominasi yang secara ideal kita bayangkan, melainkan komunikasi yang sangat padat distorsif, sehingga dunia politik kehilangan fungsi kritisnya.

Komunikasi semacam ini merupakan komunikasi yang tidak hanya terbangun atas legitimasi kekuasaan ideologis melainkan sebuah diskusi informatif ilmiah. Disini diandaikan bahwa kemajuan masyarakat diatur berdasarkan kebutuhan dan interpretasi atas kebutuhan masyarakat secara historis dalam bentuk sistem nilai, sebaliknya kepentingan-kepentingan sosial, sebagaimana tecermin dalam sistem nilai masyarakat ditata dengan mengujinya menurut kemungkinan-kemungkinan teknis dan sarana-sarana teknis pemenuhannya.

Meski demikian, masalah pengilmiah politik bukan hanya soal penentuan tujuan-tujuan rasional atas dasar pertimbangan rasional yang dilakukan oleh elit saja, namun lebih pada membuka akses yang luas bagi keterlibatan masyarakat dengan keseluruhan sistem sosial (*Civil Society*) yang ada. Jika politik adalah soal menentukan arah pembentukan diri masyarakat, politik yang rasional juga menuntut keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Artinya, politik betul-betul cermin aspirasi masyarakat.

Membahas teori konstruksi sosial (*social construction*), tentu tidak bisa terlepas dari bangunan teoretik yang telah dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Peter L. Berger merupakan sosiolog dari *New School for Social Reserach*, New York, Sementara Thomas Luckman adalah sosiolog dari *University of Frankfurt*. Teori konstruksi sosial, sejatinya dirumuskan kedua akademisi ini sebagai suatu kajian teoretis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan.

Istilah konstruksi atas realitas sosial (*social construction of reality*) menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya *The Social Construction of Reality: A Treatise inthe Sociological of Knowledge* (1966). Ia menggam-barkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.

Asal usul konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glaserfeld, pengertian konstruktif kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebar oleh Jean Piaget. Namun, apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagasan pokok konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Giam-batissta Vico, seorang epistemolog dari Italia, ia adalah cikal bakal konstruktivisme (Suparno dalam Bungin, 2008:13)

Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Sokrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia, sejak Plato menemukan akal budi dan ide. Gagasan tersebut semakin lebih konkret lagi setelah Aristoteles mengenalkan istilah, informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi dan sebagainya. Ia mengatakan bahwa, manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah logika dan dasar pengetahuan adalah fakta (Bertens dalam Bungin, 2008:13). Aristoteles pulalah yang telah memperkenalkan ucapannya '*Cogito, ergo sum*' atau 'saya berfikir karena itu saya ada' (Tom Sorell dalam Bungin, 2008:13). Kata-kata Aristoteles yang terkenal itu menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan gagasan-gagasan konstruktivisme.

Berger dan Luckman (Bungin, 2008:14) mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman 'kenyataan dan pengetahuan'. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Berger dan Luckman (Bungin, 2008:15) mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu.

Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Proses dialektis tersebut mempunyai tiga tahapan; Berger menyebutnya sebagai momen. Ada tiga tahap peristiwa. *Pertama*, eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai tertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.

Kedua, objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya.

Lewat proses objektivasi ini, masyarakat menjadi suatu realitas *suigeneris*. Hasil dari eksternalisasi kebudayaan itu misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya atau kebudayaan non-materiil dalam bentuk bahasa. Baik alat maupun bahasa

adalah kegiatan eksternalisasi manusia ketika berhadapan dengan dunia, ia adalah hasil dari kegiatan manusia.

Setelah dihasilkan, baik benda/bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang objektif. Bahkan ia dapat dihadapi manusia sebagai penghasil dari produk kebudayaan. Kebudayaan yang telah berstatus sebagai realitas objektif, ada diluar kesadaran manusia, ada “di sana” bagi setiap orang. Realitas objektif itu berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang.

Ketiga, internalisasi. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat. Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali, meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).

Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh

negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun.

Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sistem politik dan demokrasi kita saat ini (dalam makna demokrasi keindonesiaan) juga masih pada tahap mementingkan popularitas dari pada kemampuan. Demokrasi berarti suara terbanyak, sehingga siapa saja yang punya suara paling banyak, dialah yang menang, bahkan dialah yang paling benar.

Setelah berjalan beberapa waktu di era refoamasi ini, diiringi dengan disahkannya Undang-Undang tentang politik, seperti UU Pemilu, UU Pilkada Langsung, dan sebagainya, begitu banyaknya pula pesta demokrasi dalam bentuk pemilihan langsung dilaksanakan, harus diakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat semakin hari tidak menunjukkan peningkatan, tapi justru selalu menurun.

Semangat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, tidak seiring dengan kesadaran masyarakat dalam memberikan partisipasinya, yang terjadi justru kejenuhan dalam mengikuti pemilihan langsung yang bertubi-tubi, sehingga pemilu yang didesain sebagai wujud pelaksanaan demokrasi menjadi kurang dimaknai oleh pemilih di tingkat bawah.

Untuk menjawab persoalan seperti tersebut di atas, salah satu upaya yang ditempuh adalah memberikan penyadaran kepada publik akan pentingnya pemilu bagi kehidupan berdemokrasi. Peningkatan peranserta masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Begitu pentingnya Peningkatan Peranserta Masyarakat, sehingga kita menaruh harapan begitu besar pada terselenggaranya pemilu dan pilukada yang demokratis. Pada akhirnya nanti dapat mengantarkan kita untuk mewujudkan suatu masyarakat yang madani, yaitu masyarakat yang mampu berkreasi secara maksimal dan menyerap nilai-nilai demokrasi secara konstruktif, sehingga kita memiliki suatu sistem politik yang makin demokratis.

Susbtansi teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas dari Berger dan Luckmann adalah pada proses simultan yang terjadi secara alamiah melalui bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada sebuah komunitas primer dan semi sekunder. Basis sosial teori dan pendekatan ini adalah transisi-modern di Amerika pada sekitar tahun 1960-an, dimana media massa belum menjadi sebuah fenomena yang me-narik untuk dibicarakan. Dengan demikian Berger dan Luckmann tidak memasukan media massa sebagai variabel atau fenomena yangberpengaruh dalam konstruksi sosial atas realitas.

Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Luckman telah direvisi dengan melihat variabel atau fenomena media massamenjadi sangat substansi dalam proses eksternalisasi, subyektivasi, daninternalisasi inilah yang kemudian dikenal sebagai “konstruksi sosial mediamassa”. Substansi dari konstruksi sosial media massa ini adalah pada sirkulasiinformasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengansangat cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu jugamembentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis.

Proses konstruksi sosial media massa melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi

Menyiapkan materi konstruksi sosial media massa adalah tugas redaksimedia massa, tugas itu didistribusikan pada desk editor yang ada di setiap mediamassa. Masing-masing media memiliki desk yang berbeda-beda sesuai dengankebutuhan dan visi suatu media. Isu-isu penting setiap hari menjadi fokus mediamassa, terutama yang berhubungan tiga hal yaitu kedudukan, harta, danperempuan. Ada tiga hal penting dalam menyiapkan materi konstruksi sosial yaitu :

- a. Keberpihakan media massa kepada kapitalisme. Sebagaimana diketahui,saat ini hampir tidak ada lagi media massa yang tidak dimiliki oleh kapitalis.Dalam arti kekuatan-kekuatan kapital untuk menjadikan media massasebagai mesin penciptaan uang dan pelipatgandaan modal.
- b. Keberpihakan semu kepada masyarakat. Bentuk dari keberpihakan ini adalah dalam bentuk empati, simpati dan berbagai partisipasi kepada masyarakat, namun ujung-ujungnya adalah juga untuk menjual berita demi kepentingan kapitalis.
- c. Keberpihakan kepada kepentingan umum. Bentuk keberpihakan kepada kepentingan umum dalam arti sesungguhnya sebenarnya adalah visi setiap media massa, namun akhir-akhir ini visi tersebut tak pernah menunjukkanjati dirinya, namun slogan-slogan tentang visi ini tetap terdengar.

Jadi, dalam menyiapkan materi konstruksi, media massa memosisikan diripada tiga hal tersebut di atas, namun pada umumnya keberpihakan pada kepentingan kapitalis menjadi sangat dominan mengingat media massa adalah mesin produksi kapitalis yang mau ataupun tidak harus menghasilkan keuntungan.

2. Tahap sebaran konstruksi

Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media massa. Konsep konkret strategi sebaran media massa masing-masing media berbeda, namun prinsip utamanya adalah *real time*. Media cetak memiliki konsep *real time* terdiri dari beberapa konsep hari, minggu atau bulan, seperti terbitan harian, terbitan mingguan atau terbitan beberapa mingguan atau bulanan. Walaupun media cetak memiliki konsep *real time* yang sifatnya tertunda, namun konsep aktualitas menjadi pertimbangan utama sehingga pembaca merasa tepat waktu memperoleh berita tersebut.

Pada umumnya sebaran konstruksi sosial media massa menggunakan model satu arah, dimana media menyodorkan informasi sementara konsumen media tidak memiliki pilihan lain kecuali mengonsumsi informasi itu. Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada pembaca secepatnya dan setepatnya berdasarkan pada agenda media. Apa yang dipandang penting oleh media menjadi penting pula bagi pembaca.

3. Tahap pembentukan konstruksi realitas

a. Tahap pembentukan konstruksi realitas

Tahap berikut setelah sebaran konstruksi, dimana pemberitaan telah sampai pada pembaca yaitu terjadi pembentukan konstruksi di masyarakat melalui tiga tahap yang berlangsung secara generik. *Pertama*, konstruksi realitas membenaran; *kedua*, kesediaan dikonstruksi oleh media massa; *ketiga*, sebagai pilihan konsumtif.

Tahap pertama adalah konstruksi membenaran sebagai suatu bentuk konstruksi media massa yang terbangun di masyarakat yang cenderung membenarkan apa saja yang ada (tersaji) di media massa sebagai sebuah realitas kebenaran. Dengan kata lain, informasi media massa sebagai otoritas sikap untuk membenarkan sebuah kejadian. *Tahap kedua* adalah kesediaan dikonstruksi oleh media massa, yaitu sikap generik dari tahap pertama. Bahwa pilihan seseorang untuk menjadi

pembaca media massa adalah karena pilihannya untuk bersedia pikiran-pikirannya dikonstruksi oleh media massa.

Tahap ketiga adalah menjadikan konsumsi media massa sebagai pilihan konsumtif, dimana seseorang secara habit tergantung pada media massa. Media massa adalah bagian kebiasaan hidup yang tak bisa dilepaskan. Pada tingkat tertentu, seseorang merasa tak mampu beraktivitas apabila ia belum membaca koran.

b. Pembentukan konstruksi citra

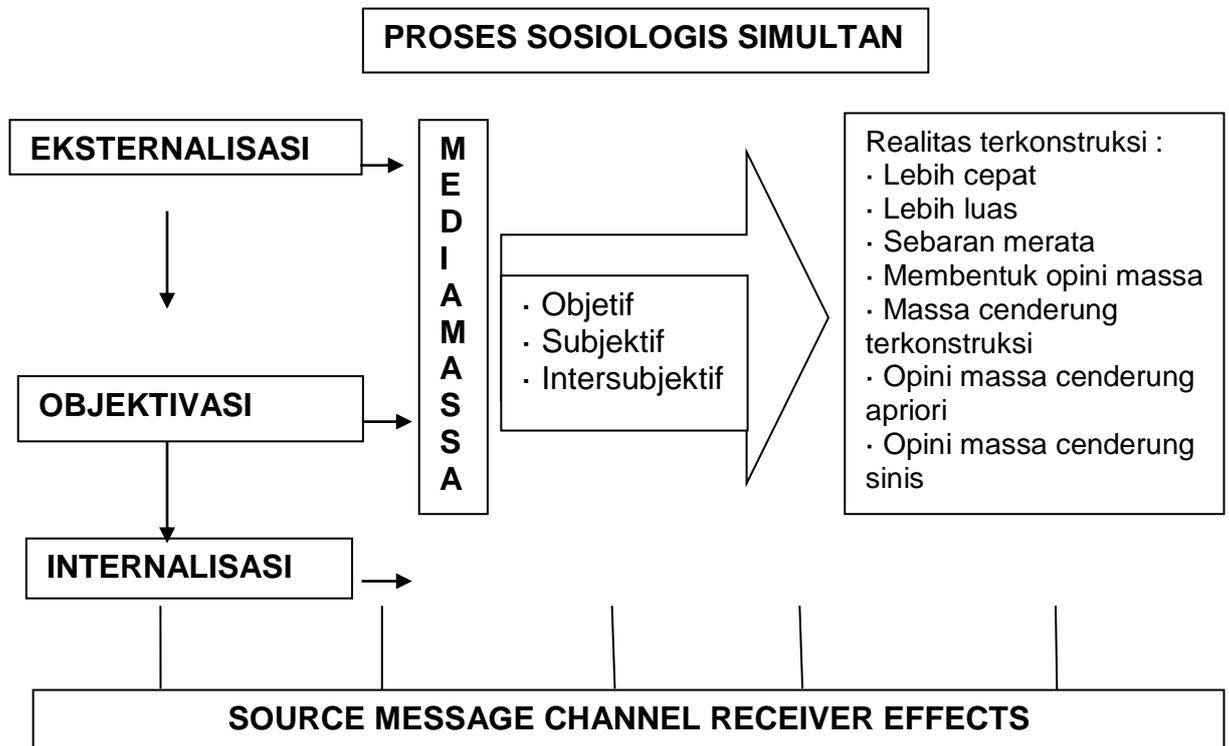
Pembentukan konstruksi citra bangunan yang diinginkan oleh tahap konstruksi. Dimana bangunan konstruksi citra yang dibangun oleh media massa ini terbentuk dalam dua model : 1) model *good news* dan 2) model *bad news*. Model *good news* adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi suatu pemberitaan sebagai pemberitaan yang baik. Pada model ini objek pemberitaan dikonstruksi sebagai sesuatu yang memiliki citra baik sehingga terkesan lebih baik dari sesungguhnya kebaikan yang ada pada objek itu sendiri. Sementara, pada model *bad news* adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi kejelekan atau cenderung memberi citra buruk pada objek pemberitaan sehingga terkesan lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat dari sesungguhnya sifat jelek, buruk, dan jahat yang ada pada objek pemberitaan itu sendiri.

4. Tahap konfirmasi

Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial. Ada beberapa alasan yang sering digunakan dalam konfirmasi ini yaitu;

- a) kehidupan modern menghendaki pribadi yang selalu berubah dan menjadi bagian dari produksi media massa,
- b) kedekatan dengan media massa adalah *life style* orang modern, dimana orang modern sangat menyukai popularitas terutama sebagai subjek media massa itu sendiri, dan
- c) media massa walaupun memiliki kemampuan mengkonstruksi realitas media berdasarkan subyektivitas media, namun kehadiran media massa dalam

kehidupan seseorang merupakan sumberpengetahuan tanpa batas yang sewaktu-waktu dapat diakses.



Gambar 2. Proses Konstruksi Sosial Media Massa

Kerangka Berpikir

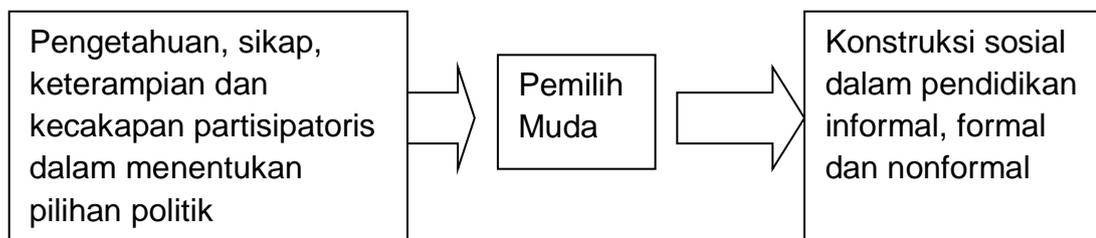
Di alam demokrasi sekarang ini warganegara tidak cukup hanya memiliki pengetahuan politik dengan segala aspeknya, tetapi dituntut pula memiliki kecakapan-kecakapan intelektual yang secara kritis dipraktikkan seperti kecakapan mendengar, mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, menilai dan mengkreasi persoalan-persoalan politik yang menjadi isu-isu publik. Selain itu, warganegara dituntut memiliki kecakapan partisipatoris antara lain kecakapan berinteraksi untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya, memonitor isu-isu publik bahkan diharapkan cakap mempengaruhi kebijakan publik.

Kecakapan Partisipatoris; adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterlibatan dan peran serta seseorang. Hal ini menyangkut: *interacting*, *monitoring*, dan *influencing* seperti berperan aktif, berpikir kritis, dan tanggap terhadap situasi politik. Hal ini berhubungan dengan kemampuan memaknai proses-proses politik pemerintahan, baik proses informal dalam keluarga, nonformal dalam masyarakat maupun formal melalui pendidikan persekolahan. Kecakapan pemilih pemula berkait erat dengan pemilu.

Pemilih Pemula: adalah pemilih yang berusia antara 17 tahun/sudah menikah sampai usia 21 tahun bertepatan dengan pelaksanaan pemilu 2019. Hal ini diluar pensiunan TNI dan Polri yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya.

Ketika seseorang menafsirkan realitas sosial tidak dengan konsepsi hampa. Seseorang selalu mengorganisasi peristiwa tiap hari. Pengalaman dan realitas yang diorganisasikan tersebut menjadi realitas yang dialami oleh seseorang. Dari perspektif ini, frame mengklasifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi secara aktif pengalaman hidup kita supaya kita bisa memahaminya. Sebuah frame adalah sebuah skema interpretasi, dimana gambaran dunia yang dimasuki seseorang diorganisasikan sehingga pengalaman tersebut menjadi punya arti dan makna. Frame menawarkan penafsiran atas berbagai realitas sosial yang berlangsung tiap hari. Maka pemilih pemula harus menentukan sikap, keterampilan dan kecakapan partisipatorisnya manakala berhadapan dengan penentuan pilihan politiknya dari calon-calon pemimpin yang ditawarkan oleh partai politik.

Dari uraian diatas, maka kerangka analisis dapat dikembangkan dengan model sebagai berikut :



Gambar 3. Kerangka Berpikir

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengetahuan politik pemilih pemula dalam memahami realitas politik.
2. Mengetahui sikap politik pemilih pemula dalam merespon dinamika sistem politik demokratis.
3. Mengetahui kecakapan politik pemilih pemula dalam merespon dinamika sistem politik demokratis.

B. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui orientasi pemilih pemula maka akan dapat memberikan manfaat disebagai berikut :

1. Memberikan informasi dalam mengembangkan prototype model pendidikan politik yang dapat diimplementasikan dalam lingkup formal maupun non formal.
2. Mengembangkan modul pendidikan politik bagi generasi muda, sehingga dinamika politik dapat direspon dengan sikap yang mendorong integrasi bangsa.

C. Luaran Penelitian

| No | Jenis Luaran | Indikator Capaian | | | |
|----|--|------------------------|------|--------|------|
| | | TS ¹⁾ | TS+1 | TS+... | TS+n |
| 1 | Publikasi ilmiah ²⁾ | Internasional | | | |
| | | Nasional Terakreditasi | | | |
| 2 | Pemakalah dalam temu ilmiah ³⁾ | Internasional | | | |
| | | Nasional | Ada | | |
| 3 | <i>Invited speaker</i> dalam temu ilmiah ⁴⁾ | Internasional | | | |
| | | Nasional | | | |
| 4 | <i>Visiting Lecturer</i> ⁵⁾ | Internasional | | | |
| | | Paten | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| 5 | Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ⁶⁾ | | | | |
| | | Paten sederhana | | | |
| | | Hak Cipta | | | |
| | | Merek dagang | | | |
| | | Rahasia dagang | | | |
| | | Desain Produk Industri | | | |
| | | Indikasi Geografis | | | |
| | | Perlindungan Varietas Tanaman Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu | | | |
| 6 | Teknologi Tepat Guna ⁷⁾ | | | | |
| 7 | Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial ⁸⁾ | Ada | | | |
| 8 | Buku Ajar (ISBN) ⁹⁾ | | | | |
| 9 | Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) ¹⁰⁾ | | | | |

BAB 4

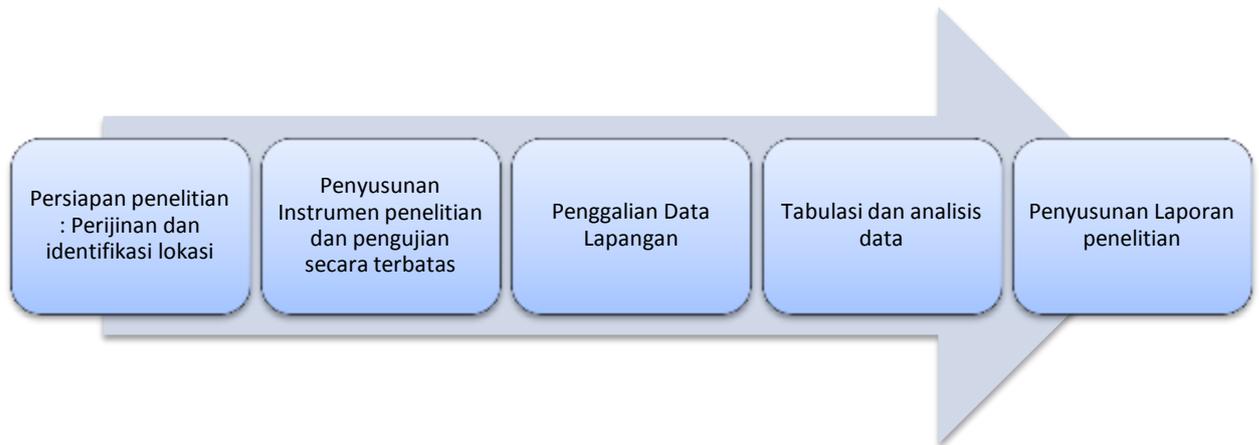
METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang orientasi pemilih muda di Jawa Timur. Oleh sebab itu metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan angket terbuka. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Peristiwa yang menjadi pusat penelitian akan dideskripsikan tanpa ada pemberian perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Data diperoleh dengan cara angket terbuka untuk menjangkau data dan informasi yang mengarah pada gambaran kecenderungan umum. Angket disusun secara terbuka guna dapat menggambarkan pengetahuan, perasaan, sikap, dan penilaian responden terhadap kehidupan bernegara, berkewarganegaraan, beserta semua aspek kehidupan sosial politik yang responden rasakan.

Semua data kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif sehingga ditemukan gambaran data secara komprehensif. fakta-fakta yang ada akan digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Analisis statistik akan digunakan sebagai data menunjang dari semua fakta yang hendak digambarkan. Bagian ini juga menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu dalam rangka penginterpretasian data sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah penelitian yang akhirnya akan diinterpretasikan dan disimpulkan.

Tahapan penelitian dilaksanakan secara sistematis dalam desain penelitian secara sistematis. Tahapan penelitian diawali dengan persiapan penelitian. Persiapan penelitian meliputi persiapan pengorganisasian kinerja penelitian, persiapan sarana dan prasarana penelitian, serta perijinan. Tahapan berikutnya adalah penyusunan instrument penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan pengkajian secara teoritis berdasarkan informasi pustaka dan pemanfaatan literatur serta hasil penelitian sebelumnya yang mendukung. Draf instrument kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya dalam sample yang terbatas. Hasil revisi dari draf instrument menjadi alat ukur dalam pelaksanaan penelitian. Tahapan pelaksanaan penelitian meliputi pengambilan data lapangan, proses tabulasi data guna

pengolahan data, dan analisis data. Tahapan akhir dari penelitian adalah penyusunan laporan penelitian. Desain Penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Bagan 4. Desain Penelitian

Responden penelitian dipilih secara acak dengan kriteria responden adalah siswa atau mahasiswa yang telah memiliki hak pilih dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 dan Pemilihan Umum tahun 2019. Responden Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah tidak terbatas yang berada wilayah Surabaya namun juga wilayah lain di Jawa Timur, Gresik, Jombang, Kediri, Madiun, untuk mengetahui orientasi pemilih. Total seluruh responden dalam penelitian ini adalah 251 orang yang berasal dari 27 kabupaten kota di Jawa Timur. Adapun rincian jumlah responden berdasarkan daerah asalnya dapat dijelaskan dalam tabel 1.

Tabel 1 Asal dan Jumlah Responden

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Responden |
|----|----------------|------------------|
| 1 | Bangkalan | 8 |
| 2 | Banyuwangi | 8 |
| 3 | Blitar | 8 |
| 4 | Bojonegoro | 8 |
| 5 | Gresik | 12 |
| 6 | Jombang | 12 |
| 7 | Kediri | 12 |
| 8 | Lamongan | 12 |
| 9 | Lumajang | 8 |
| 10 | Madiun | 8 |

| | | |
|----|-------------|-----|
| 11 | Magetan | 8 |
| 12 | Malang | 8 |
| 13 | Mojokerto | 12 |
| 14 | Nganjuk | 8 |
| 15 | Ngawi | 8 |
| 16 | Pacitan | 8 |
| 17 | Pasuruan | 8 |
| 18 | Ponorogo | 10 |
| 19 | Probolinggo | 8 |
| 20 | Sampang | 8 |
| 21 | Sidoarjo | 14 |
| 22 | Situbondo | 8 |
| 23 | Sumenep | 8 |
| 24 | Surabaya | 15 |
| 25 | Trenggalek | 8 |
| 26 | Tuban | 8 |
| 27 | Tulungagung | 8 |
| | Total | 251 |

BAB 5
HASIL YANG DICAPAI

Di bawah ini tersaji rekapitulasi hasil angket mahasiswa sebagai pemilih pemula dari 8 perguruan tinggi di Surabaya.

Tabel 1: Pengetahuan/pemahaman Pemilih Muda

| No. Q | ALTERNATIF JAWABAN | | | | | | | | Ket. |
|----------|--------------------|-------|-----|-------|----|------|-----|-------|------------|
| | A | % | B | % | C | % | D | % | |
| 4. | 11 | 5,5 | 61 | 30,5 | 77 | 38,5 | 51 | 25,50 | |
| 5. | 44 | 22,00 | 20 | 10,0 | 95 | 47,5 | 7 | 3,5 | 34 (17,0%) |
| 6. | 81 | 40,50 | 29 | 14,5 | 33 | 16,5 | 57 | 28,50 | |
| 7. | 14 | 7,0 | 150 | 75,0 | 30 | 15,0 | 6 | 3,0 | |
| 8. | 69 | 34,50 | 28 | 14,0 | 38 | 19,0 | 65 | 32,50 | |
| 9. | 131 | 65,50 | 10 | 5 | 36 | 18,0 | 23 | 11,50 | |
| 10. | 63 | 31,50 | 34 | 17,0 | 74 | 37,0 | 29 | 14,50 | |
| 11. | 72 | 36,00 | 23 | 11,5 | 25 | 12,5 | 80 | 40,0 | |
| 12. | 154 | 77,00 | 18 | 9,0 | 18 | 9,0 | 10 | 5,0 | |
| 13. | 87 | 43,50 | 17 | 8,5 | 26 | 13 | 70 | 35,00 | |
| 14. | 38 | 18,00 | 99 | 49,5 | 46 | 23,0 | 17 | 8,5 | |
| 15. | 87 | 43,50 | 24 | 12,0 | 35 | 17,5 | 54 | 27,0 | |
| 16. | 15 | 7,5 | 86 | 43,0 | 45 | 22,5 | 54 | 27,0 | |
| 17. | 31 | 15,5 | 40 | 20,0 | 24 | 12,0 | 105 | 52,5 | |
| 18. | 18 | 9,0 | 30 | 15,0 | 14 | 7,0 | 138 | 69,0 | |
| 19. | 14 | 7,0 | 18 | 9,0 | 49 | 24,5 | 119 | 59,5 | |
| 20. | 36 | 18,00 | 81 | 40,50 | 25 | 12,5 | 58 | 29,0 | |

Tabel 2: Sikap Pemilih Muda

| No. Q | Alternatif Jawaban | | | | Keterangan |
|-------|--------------------|------|----|------|------------|
| | A | % | B | % | |
| 21. | 150 | 75,0 | 50 | 25,0 | |
| 22. | 164 | 82,0 | 36 | 18,0 | |
| 23. | 156 | 78,0 | 44 | 22,0 | |
| 24. | 163 | 81,5 | 37 | 19,5 | |
| 25. | 148 | 74,0 | 52 | 26,0 | |
| 26. | 171 | 85,5 | 29 | 14,5 | |
| 27. | 153 | 76,5 | 47 | 23,5 | |

| | | | | | |
|-----|-----|------|----|------|--|
| 28. | 170 | 85,0 | 30 | 15,0 | |
| 29. | 168 | 84,0 | 32 | 16,0 | |
| 30. | 150 | 75,0 | 50 | 25,0 | |
| 31. | 147 | 73,5 | 53 | 26,5 | |
| 32. | 145 | 72,5 | 55 | 27,5 | |
| 33. | 168 | 84,0 | 32 | 16,0 | |
| 34. | 156 | 78,0 | 44 | 22,0 | |
| 35. | 161 | 80,5 | 39 | 19,5 | |

Tabel 3: Penilaian Pemilih Muda

| No | Alternatif Jawaban | | | | | | | | Ket |
|-----|--------------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|-----|
| | A | % | B | % | C | % | D | % | |
| 36. | 95 | 47,50 | 69 | 34,50 | 25 | 12,50 | 11 | 5,50 | |
| 37. | 127 | 63,50 | 40 | 20,00 | 27 | 13,50 | 6 | 3,00 | |
| 38. | 17 | 8,50 | 35 | 17,50 | 57 | 28,50 | 91 | 45,50 | |
| 39. | 90 | 45,00 | 64 | 32,00 | 34 | 17,00 | 12 | 6,00 | |
| 40. | 31 | 15,50 | 61 | 30,50 | 69 | 34,50 | 39 | 19,50 | |
| 41. | 28 | 14,00 | 50 | 25,00 | 54 | 27,00 | 68 | 34,00 | |
| 42. | 69 | 34,50 | 47 | 23,50 | 53 | 26,50 | 51 | 25,50 | |
| 43. | 34 | 17,00 | 47 | 23,50 | 56 | 28,00 | 63 | 31,50 | |
| 44. | 59 | 29,50 | 49 | 24,50 | 47 | 23,50 | 45 | 22,50 | |
| 45. | 30 | 15,00 | 41 | 20,50 | 49 | 24,50 | 80 | 40,00 | |
| 46. | 64 | 32,00 | 61 | 30,50 | 51 | 25,50 | 23 | 11,50 | |
| 47. | 97 | 48,50 | 44 | 22,00 | 41 | 20,50 | 19 | 9,50 | |
| 48. | 97 | 48,00 | 40 | 20,00 | 38 | 19,00 | 26 | 13,00 | |
| 49. | 84 | 42,00 | 68 | 34,00 | 40 | 20,00 | 8 | 4,00 | |
| 50. | 53 | 26,50 | 71 | 35,50 | 27 | 13,5 | 33 | 16,50 | |

Keadaan sosial ekonomi bangsa yang belum begitu banyak beranjak dari keterpurukannya nampaknya masih akan menjadi “*barang dagangan*” yang cukup menarik untuk ditawarkan. Disamping masih banyaknya potensi tema kebangsaan yang lain yang masih cukup menarik untuk diperdagangkan kepada khalayak umum khususnya pemilih pemula. Tak ketinggalan juga sebetulnya kesadaran yang semakin mengkollektif terhadap wacana kepemudaan dan kesetaraan gender yang kian mencuat kuat diinternal para elit politik di negeri ini. Cepat atau lambat pasti akan muncul tarikan-tarikan yang cukup kuat antar partai politik di negeri ini untuk menggiring pemilih pemula kedalam wadah politik yang bertujuan untuk memfasilitasi berbagai kepentingan mereka saat itu maupun dalam akses jangka panjang. Tentu tujuan-tujuan itu akan lebih banyak bersifat praktis ketimbang sesuatu yang lebih ideologis, meski tidak semua akan menunjukkan perwajahan yang sama.

Partai-partai politik perlu meletakkan secara dini akan arti penting pendidikan politik bagi pemilih (*voter education*). Dalam penelitian ini lebih mengarah kepada pendidikan pemilih pemula yang sudah menjadi mahasiswa awal. Di sadari atau tidak hingga saat ini dunia politik masih meletakkan pemilih pemula sebagai objek sasar saja. Budaya ini bukanlah kebiasaan sikap yang hadir begitu saja. Politik bukan urusan pemilih pemula, begitu kira-kira kebijakan itu bisa terbaca, walaupun beberapa partai politik sudah menetapkan strategi untuk menarik pemilih pemula.

Jadi teknik pembinaan agama yang dilakukan melalui internalisasi adalah pembinaan yang mendalam dan menghayati nilai-nilai relegius (agama) yang dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang sarannya menyatu dalam kepribadian peserta didik, sehingga menjadi satu karakter atau watak peserta didik.

Dalam kerangka psikologis, internalisasi diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standart tingkah laku, pendapat dan seterusnya di dalam kepribadian. Freud yakin bahwa superego, atau aspek moral kepribadian berasal dari internalisasi sikap-sikap parental (orang tua). (Chaplin, 2002 : 256).

Dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan peserta didik atau anak asuh ada tiga tahap yang mewakili proses/tahap terjadinya internalisasi (Muhaimin, 1996 : 153), yaitu:

- a. Tahap Transformasi Nilai : Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan peserta didik atau anak asuh
- b. Tahap Transaksi Nilai : Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal-balik.
- c. Tahap Transinternalisasi : Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan secara aktif.

Jadi dikaitkan dengan perkembangan manusia, proses internalisasi harus berjalan sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. Internalisasi merupakan sentral proses perubahan kepribadian yang merupakan dimensi kritis pada perolehan atau perubahan diri manusia, termasuk di dalamnya pemribadian makna (nilai) atau implikasi respon terhadap makna. Internalisasi adalah proses pemasukan nilai pada seseorang yang akan membentuk pola

pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman. Nilai-nilai tersebut bisa jadi dari berbagai aspek baik agama, budaya, norma sosial dll. Pemaknaan atas nilai inilah yang mewarnai pemaknaan dan penyikapan manusia terhadap diri, lingkungan dan kenyataan di sekelilingnya.

Pemuda yang lekat dengan karakter *agent of change* nampaknya di upayakan sedemikian rupa agar tidak berurusan dengan kehidupan politik. Mahasiswa tugasnya adalah belajar titik. Tidak perlu memperdulikan urusan BBM naik, harga-harga kebutuhan pokok naik, biaya sekolah naik, maraknya tindak korupsi, dsb. Seabrek kebijakan politis yang tidak populis sekali lagi bukan urusan mereka. Kekritisan yang sebenarnya melibatkan kepekaan sosial mahasiswa tidak diizinkan sedemikian rupa. Kekritisan yang melibatkan kecerdasan moral mahasiswa juga dianggap sesuatu yang tidak wajar. Daya kritis itu dipaksakan untuk hilang, yang tetap kritis selalu akan di cap sebagai anak yang bermasalah, berstigma negatif. Bahkan tidak sedikit orang tua yang melarang anaknya untuk terlibat dalam aktivitas politik lantaran hadirnya kesan negatif bahwa politik itu kotor. Di sinilah pendidikan politik dikalangan mahasiswa belum mendapatkan apresiasi yang cukup serta memadai dari berbagai pihak termasuk para elit partai politik.

Riuhnya penghelatan politik negeri ini menuju 2019, setelah selesainya perdebatan soal pengesahan Partai Politik peserta pemilu 2019 sebagai gerbong aspirasi oleh KPU yang begitu panjang dan lebar menyita perhatian sebagian besar publik, sebab selalu saja ada intrik walau bersifat latent. Kini partai politik (parpol) di tingkat Pengurus Pusat sampai dengan Pengurus Daerah Kab/Kota berlomba - lomba mencari sosok yang akan menjadi petarung mereka di arena pertarungan para legislator. Ada yang berasal dari kader tulen namun tak sedikit juga yang berasal dari luar kader yang ikut gerbong partai politik untuk memperebutkan kursi wakil rakyat. Entah karena ajakan parpol maupun panggilan jiwa demi kemaslahatan yang terkesan muslihat.

Jika kader tulen parpol memiliki sedikit cukup alasan untuk membenarkan diri bertarung di arena politik legislatif, sebagai seorang kader sekaligus sebagai pengejewentah-an visi - misi partai politik didalam proses pengkaderan, maka hal ini berbeda dengan mereka yang berasal dari luar kader partai politik. Berbagai argumentasi yang kadang terdengar klise mencoba mereka bangun, untuk meyakinkan kehadiran mereka bergabung dengan Partai Politik dan menjadi kandidat wakil rakyat. Panggilan nurani, tanggung jawab moral sebagai warga negara, wadah perjuangan untuk rakyat

sampai adanya keinginan untuk memperbaiki wajah wakil rakyat yang sepanjang hidupnya selalu mepertontonkan perilaku korupsi yang masif menjadi warna tersendiri akan keragaman argumentasi. Sah - sah saja namun lintasan sejarah wakil rakyat negeri ini telah mengajarkan kita, bagaimana kata - kata itu selalu saja tak seindah kenyataan, tatkala mereka telah sukses meduduki kursi wakil rakyat.

Janji - janji saat kampanye dan hendak menjadi wakil rakyat yang tak ayal mencipta surgawi dunia, seolah lenyap terbawa angin tatkala menjadi wakil rakyat. Mereka tak lagi riuh dengan janji yang pernah terucap tetapi sebaliknya riuh dengan meramu strategi merampok uang rakyat, memperdaya negara untuk mengembalikan modal saat kampanye dan mengambil untung, mengisi lumbung harta mereka. Ironisnya lagi, perilaku itu kadangkala dilakukan secara kolektif / berjamaah memanfaatkan kewenangan mereka, seolah saling mengisi strategi perampokan sehingga negara terkadang sulit untuk mengendus perilaku mereka.

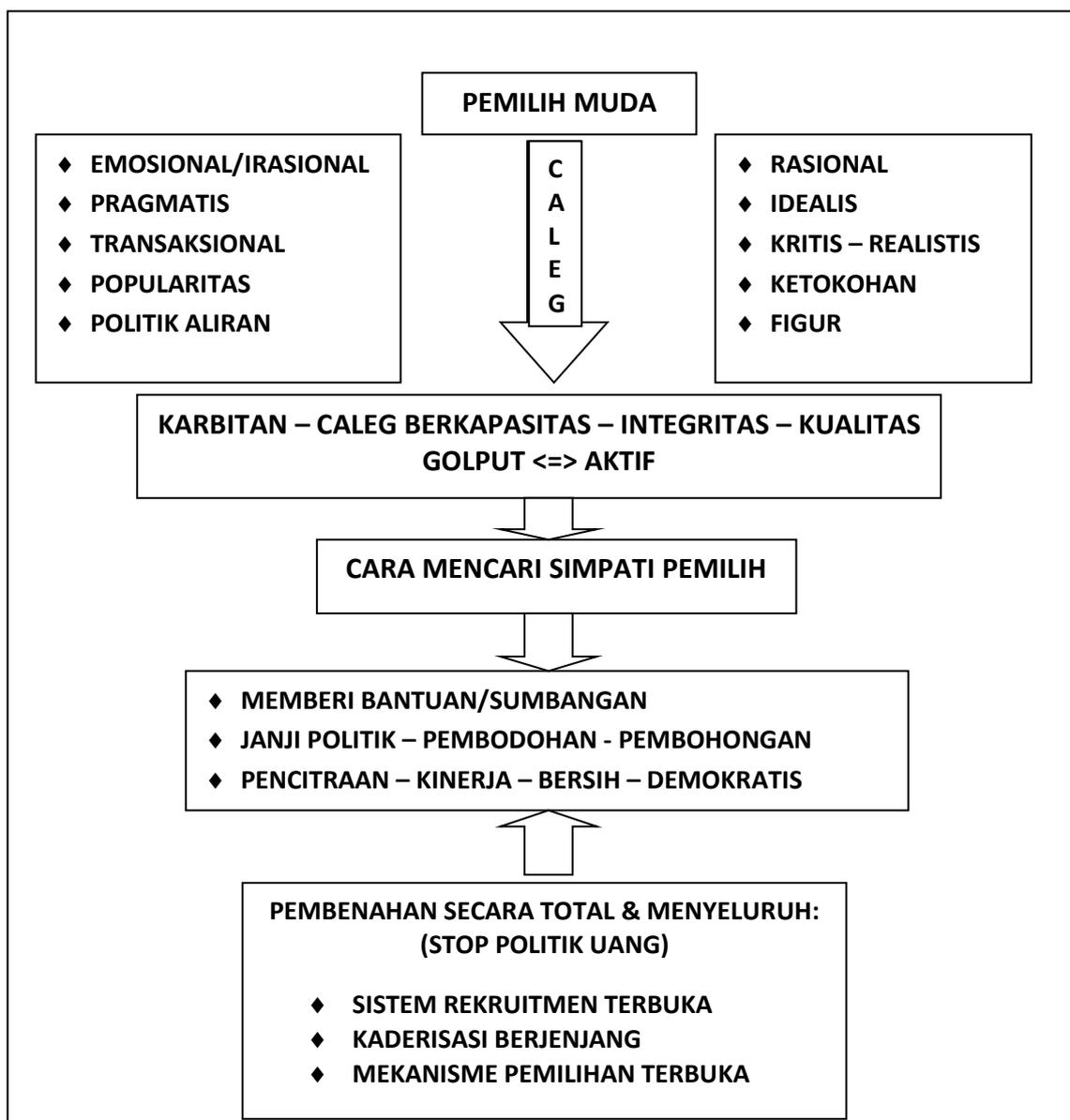
Selain perilaku garong yang telah menjadi rahasia umum, kompetensi wakil rakyat kita yang kebanyakan sangat *not qualified* menjadi permasalahan tersendiri tatkala berhadapan dengan aspirasi masyarakat. Fasilitas serba mewah yang mereka terima tidaklah sebanding dengan produk perundang - undangan yang dilahirkan, terkesan lamban dan kurang responsif sehingga banyak produk undang - undang yang sangat strategis berjalan sebatas wacana tanpa realisasi. Belum lagi Undang - Undang yang dilahirkan seringkali tak aspiratif, multitafsir dan tak sejalan dengan tuntutan publik secara objektif. Perpaduan jiwa korup dan kompetensi yang kurang memadai menambah semakin ruwetnya produk perundang - undangan di negeri ini. Kebijakan undang - udangan yang lahir tanpa kecermatan dan analisis yang matang serta acapkali berpihak pada kepentingan pihak luar demi materi lagi - lagi menjadikan rakyat sebagai korban kebijakan yang salah arah.

Nampaknya tren dinasti politik, tidak saja terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain seperti Amerika Serikat bisa dilihat dari generasi keluarga Bush. Di Pakistan dan India juga terjadi dinasti politik. India dua periode dipimpin oleh keluarga Nehru, sedangkan di Pakistan terdapat dinasti Benazir Bhutto. "Sebenarnya dinasti politik tidak masalah asal dibangun secara adil (*fair*). Bukan melalui kamufase yang patut dicurigai.

Selama satu dasawarsa terakhir, di sejumlah daerah (misalnya di Provinsi Banten, Kabupaten Kediri, Kabupaten Kutai) mata rantai alih kuasa dalam satu dinasti politik makin tak kenal jeda. Proses demokrasi di daerah dengan mekanisme pilkada hanya jadi

pesta besar sejumlah dinasti. Kuasa dinasti yang mencengkeram sejumlah daerah ini pun berkelindan dengan kepentingan dinasti di level lokal dan nasional. Anak, istri, adik, dan kakak dari sejumlah kepala daerah pun ramai-ramai bertarung dalam kontes pemilu legislatif untuk DPRD, DPD, dan DPR. Sistem politik yang dibangun dengan semangat demokrasi makin dibajak oleh sejumlah dinasti. Sudah saatnya kita belajar dari dampak negatif dinasti politik di sejumlah negara. Pada masa Orde Baru, dinasti politik telah menjadi "momok" dan diyakini menjadi penyebab utama maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

KEPERCAYAAN PEMILIH PEMULA TERHADAP KANDIDAT & PARPOL



Masyarakat pada Pemilu 2019 nampaknya akan “menghukum” calon anggota legislatif (caleg). Artinya, caleg yang populer tapi tidak berkapasitas dan berkualitas harus rela tidak mendapat kepercayaan pemilih. “Masyarakat pemilih yang mempunyai hak politik dan berkeinginan menggunakan hak politiknya pada pemilu akan semakin kritis. Caleg populer memang mudah memancing emosi pemilih dalam arti bisa jadi alternatif pilihan. Tapi bisa juga pemilih menghukum dengan tidak memilih caleg populer.

Berbagai pemberitaan yang ada akan sangat mempengaruhi pilihan politik pemilih. “Caleg harus pandai-pandai membangun opini positif di masyarakat. Setidaknya caleg itu turun ke bawah dan kooperatif terhadap struktur partai yang mengusungnya jadi caleg. Popularitas caleg tidak akan menjamin keterpilihan. “Popularitas tidak berbanding lurus dengan elektabilitas. Pemilih semakin cerdas dan objektif memilih caleg. “Masyarakat semakin rasional dan sudah mulai memahami pentingnya punya wakil yang bertanggungjawab.

Munculnya krisis kepercayaan terhadap wakil rakyat dinilai - karena tidak ada lagi idealisme dalam diri mereka - bahwa idealisme haruslah tetap dimiliki oleh seorang wakil rakyat karena hal itu yang membedakan dia memperjuangkan kepentingan rakyat atau tidak. “Kader-kader yang memiliki idealisme haruslah tetap diperjuangkan, didorong dan diingatkan agar tetap menjaga idealisme mereka. Jika kemudian mereka menjadi wakil rakyat maka mereka harus tetap menjaga idealisme itu jika perlu diwujudkan dalam setiap program. Idealisme harus disertai dengan integritas yang kuat karena tanpa integritas seseorang akan sulit dipercaya. Bisa saja caleg punya idealisme yang luar biasa tetapi ternyata tidak punya integritas. Bahwa caleg yang harus dipilih adalah mereka yang memiliki idealisme, integritas dan bukan karbitan. “Sangatlah penting untuk memilih seseorang yang punya idealisme dan berintegritas. Dan biasanya ciri seperti itu ada didalam diri seorang kader bukan yang karbitan.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengetahuan politik pemilih pemula belum memadai, aktivitas dalam organisasi yang masih minim, pengaruh budaya orang tua (kategori pemilih tradisional) belum cukup menjadi pemilih yang cerdas, rasional, kritis, dan obyektif dalam menentukan sikap dan penilaian politiknya. Mendidik para pemilih untuk bersikap rasional adalah sesuatu yang mutlak bagi kelangsungan demokratisasi yang sedang merangkak di antara bayang-bayang kekuasaan otoriter masa silam. Agenda-agenda reformasi terutama dikandaskan oleh ketiadaan evaluasi rasional dari para pemberi legitimasi kekuasaan, yaitu para pemilih. Logika para penguasa tentu saja bagaimana mempertahankan ke-kuasaan. Kalau para penguasa itu akan tetap bertahan dengan membohongi rakyat, maka itu akan dilakukan oleh mereka. Rakyat khususnya pemilih pemula harus bisa mandiri dalam menentukan sikap politik dan diharapkan secara simultan melakukan penilaian terhadap berbagai fenomena poliitik yang terjadi.

Bila pemilu dengan tingkat pemilih tradisional yang mayoritas, tidak akan merubah apa-apa. Bahwa serasional apapun pemilih, yang berkuasa tetap golongan elit tertentu; kekuasaan hanya akan berpindah dari satu elit ke tangan elit yang lain. Tapi rasionalitas pemilih akan menjadi satu tekanan bagi para elit politik untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat. Mereka akan bersaing melakukan yang terbaik. Para politisi akan berbuat sekehendak hatinya, kalau melihat kenyataan bahwa para pemilih ternyata tidak cerdas dan mudah dibodohi. Mereka akan menggunakan kekuasaan sekehendak hatinya. Munculnya banyak nama yang bermasalah menunjukkan bahwa para politisi kita belum terlalu takut kepada hukuman masyarakat pemilih. Bahkan para politisi busuk itu cenderung memanfaatkan ketidak-rasionalan para pemilih. Hal ini sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi. Demokrasi muncul dari sebuah rasionalitas kekuasaan, dan bergerak di antara orang-orang rasional.

Jika pemilu dipandang sebagai salah satu tolok ukur demokrasi. Keyakinan kuat pada pemilu sebagai ukuran utama demokrasi didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain; pemilu merupakan proses terbaik dibanding sistem karir dan penunjukkan/ pengangkatan, untuk menentukan pemimpin politik; pemilu memungkinkan pergantian

kekuasaan secara berkala dan membuka akses bagi aktor-aktor baru masuk dalam arena kekuasaan; dan pemilu memungkinkan partisipasi rakyat untuk menentukan pemimpin sesuai dengan kehendak mereka. Namun bila keyakinan yang berlebihan terhadap pemilu justru bisa menjadi jebakan yang menyesatkan, karena tanpa penghayatan demokrasi dari kalangan politisi, pemilu hanya merupakan sebuah proses “demokrasi berkala” untuk membentuk demokrasi elektoral-formal dalam proses itu, rakyat hanya bisa memberikan pilihan (*voting*) dalam ritual lima tahunan. Tanpa terobosan dalam penerapan sistem - dengan segala elemen teknisnya, pemilu hanyalah proyek politik demokrasi elektoral-formal semata-mata yang tidak berimplikasi dan memiliki manfaat bagi rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dimaksud adalah kinerja wakil rakyat di lembaga perwakilan dan eksekutif yang berpihak pada kepentingan rakyat sehingga menjembatani kesenjangan antara politik formal (*formal politics*) hasil proses elektoral dengan politik sehari-hari (*everyday life politics*).

1. Untuk mengembangkan dan memperkuat pengetahuan, sikap dan kemampuan menilai dari pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya secara cerdas, maka ia harus diberi ruang yang memadai untuk mencari informasi dan aktif berpartisipasi dalam berbagai forum di ruang publik sebagai anggota masyarakat demokratis, sehingga tidak mudah didikte orang lain atau hanya memenuhi tuntutan orang lain.
2. Sebagai pemilih pemula yang cerdas, efektif dan memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakan hak politiknya ia harus berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir secara kritis, bertindak secara sadar dalam dunia yang plural. Hal ini akan memungkinkan berempati, mendengar, mengakomodasi pemikiran orang lain yang berbeda.
3. Agar pemilu/pemilukada memperoleh partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dari pemilih pemula, maka akan memberi harapan meng-hasilkan masyarakat demokratis dan kemungkinan terjadinya perubahan sosial yang berarti. Jika pemilih pemula memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk mewujudkan partisipasi politik harus dibiasakan melakukan refleksi kritis dalam pelaksanaan hak dan tanggung jawabnya, maka akan berkembang karakter/komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi.

B.Saran

1. Proses rekrutmen seharusnya berlangsung terbuka/transparan dan partisipatif, baik dalam menyusun pedoman rekrutmen calon (penjaringan, penyaringan, dan penetapan dalam daftar berikut nomor urut), dominasi dan berpengaruh sekelompok elit politik dalam menentukan nomor urut atau nominasi dalam daftar calon hendaknya dihilangkan. Bila masyarakat tidak ikut menentukan siapa saja yang berhak duduk dalam daftar calon karena dianggap otoritas penuh partai politik, maka calon sama sekali tidak memiliki kepekaan terhadap nasib konstituen karena dia merasa hanya “mewakili” daerah administratif, bukan konstituen yang sebenarnya, akibatnya upaya membangun akuntabilitas dan responsivitas menjadi sangat lemah.
2. Dalam proses rekrutmen hendaknya ada relasi antara parpol dan masyarakat sipil yang hadir tidak sebatas bilangan angka, tetapi konstituen yang harus dihormati dan diperjuangkan aspirasinya. Pada saat bersamaan berbagai ormas berperan sebagai *under-bouw*, mesin politik yang bertugas tidak sekedar memobilisasi massa, tetapi betul-betul sebagai basis perjuangan politik partai. Parpol seharusnya sebagai bagian dari gerakan sosial untuk mempengaruhi kebijakan dan mengontrol negara, bukan “kendaraan politik” pihak tertentu untuk meraih kekuasaan dan kekayaan. Realitas politik menunjukkan bahwa anggota legislatif berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan, bukan pada misi perjuangan yang berupaya pemberdayakan rakyat sehingga pada saat duduk di lembaga perwakilan, mereka melupakan massa yang menjadi basis dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Althusser, Louis. 2004. *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Almond. A Gabriel dan Verba. 1990. *Budaya Politik Tingkah laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amal, Ichlasul (2008). *Peran Media Massa dalam Menyukkseskan Pemilu 2009*. Paper dipresentasikan dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan Menko Polhukam, di Jakarta, tanggal 22 Oktober 2008.
- Andersen, Benedict. 2002 (cet.ke-2). *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ayatrohaedi (penyunting). 1986. *Kepribadian Jiwa Bangsa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Althusser, Louis. 2004. *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Berger, Peter L dan Thomas Luckman. 1967. *The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge*, New York : Anchor Books.
- Benedanto, Pax (Penyunting), *Pemilihan Umum 1999: Demokrasi atau Rebutan Kursi.*, Jakarta: LSPP, 1999.
- Budiardjo, Miriam. 1998 *Partisipasi dan Partai Politik*, edisi revisi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- DeFleur, Melvin and Sandra Ball-Rokeach.1989. *Theories of Mass Communication*, 5th Edition, New York- London : Longman.
- Fagen, Richard R. 11966 *Politics and Communication*, Boston : Little Brown Company.
- Fatah, Eef Saefulloh. 2006. *Puisi Indah, Prosa Buruk: Evaluasi Dua Tahun Kebijakan Pemerintahan SBY-JK*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Faules, Don F, dan Dennis C. Alexander.1978 *Communication and Social Behavior : A Symbolic Interaction Perspective, Reading* : Addison-Wesley Publishing Company.
- Feith, Herbert. 1999; *Pemilihan Umum1955 di Indonesia*, (edisi terjemahan), Jakarta : KPG.
- Fishman, Mark. 1988. *Manufacturing the News*, Austin : University of Texas Press.

- Fukuyama, Francis. 2005. *Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Giddens, Anthony. 1994. *Living A Post-Traditional Society*. Polity Press, Cambridge.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Jakarta: Granit, 2004.
- Huntington, Samuel P. and Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in developing Countries*. (Cambridge: Harvard University Press,1982)
- Kuntowijoyo.1999. *Budaya dan Masyarakat*. Cet.ke-2. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Lombard, Denys. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Batas-Batas Pembaratan* , Jilid 1. Jakarta: Gramedia
- McNair, Brian. 1995. *An Introduction to Political Communication*, London, Routledge, 1995.
- McQuail, Dennis, dan Sven Windahl. 1996. *Communication Models : for The Study of Mass Communication*, NY : Longman.
- Micklethwait, John & Wooldridge, Adrian. 2007. *Masa Depan Sempurna: Tantangan dan Janji Globalisasi*. Jakarta: Yayasan Obor
- Nimmo, Dan. 1978. *Political Communication and Public Opinion in America*, Santa Monica, California: Goodyear Publishing, 1978.
- Ohmae, Kenichi. 2002. *Hancurnya Negara Bangsa: Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Berbatas*. Yogyakarta: Qalam
- Surjomihardjo, Abdurahman. 2002. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Steger, Manfred B. 2002. *Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar*. Yogyakarta: Lafadl Pustaka.
- Tuchman, Gaye. 1980. *Making News, A Study in the Construction of Reality*, NY : The Free Press.
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/18/p5s9jc428-kpu-pemilih-muda-tentukan-masa-depan-bangsa>
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/08/1946582/Antusiasme.Pemilih.Muda>



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Nomor 387/UN38/HK/PM/2018

TENTANG

**PENETAPAN NAMA NAMA PENERIMA PENELITIAN DANA UKT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM (FISH) TAHUN 2018
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan/Prodi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Surabaya melalui Dana UKT Tahun Anggaran 2018 sesuai komitmen dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu menetapkan penerima Penelitian tersebut;
- b. bahwa pertimbangan tersebut tersebut pada butir a diatas, memandang perlu menerbitkan Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Uniuersitas Negeri Surabaya;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 98 Tahun 2016, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu dilingkungan Kemristekdikti;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 79 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
15. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN NAMA NAMA PENERIMA PENELITIAN DANA UKT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM (FISH) TAHUN 2018 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.**
- KESATU : Menetapkan yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai penerima Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan/Prodi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) melalui Dana UKT Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penerima Penelitian Kebijakan Fakultas/Jurusan/Prodi (FISH) melalui Dana UKT Tahun Anggaran 2018, wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku, dan secara tertulis memberikan laporan kepada Rektor Universitas Negeri Surabaya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Maret sampai dengan bulan Nopember 2018 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 5 Maret 2018
Rektor,

ttd

WARSONO

NIP 196005191985031002

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti RI
3. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti RI
4. Para Wakil Rektor Unesa
5. Para Dekan, selingkung Unesa
6. Direktur Pascasarjana. Ketua Lembaga
7. Kepala Biro di lingkungan Unesa

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

BUDIARSO

NIP 196005131980101002

DAFTAR PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN DANA UKT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2018

| No. | Fak. | Jurusan | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Tim Peneliti | NIDN | Gol | Pend. | L/P | Waktu (bln) | Dana (Rp.) | Sumber Dana |
|-----|------|----------------|---|-------------|---|--|--|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| 1 | FISH | PMP-KN | Persepsi Perempuan Pekerja Rumah Tangga Di Surabaya Barat Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 | Pendidikan | Dr. Oksiana Jatningsih, M.Si. Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H. Siti Maizul Habibah, S.Pd., M.A. | 0001106703 0019098501 0012128902 | IV/b III/b III/b | S-3 S-2 S-2 | P L P | 9 | 8.000.000 | UKT |
| 2 | FISH | PMP-KN | Orientasi Politik Pemilih Muda Dalam Merespon Dinamika Demokrasi Politik (Studi Pada Pemilih Muda Di Jawa Timur) | Pendidikan | Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP. Dr. Hj. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si. Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si. | 0014057403 0025086704 0016087208 | III/c IV/c III/b | S-2 S-3 S-2 | P P L | 9 | 13.000.000 | UKT |
| 3 | FISH | PMP-KN | Pengetahuan Dan Sikap Peserta Didik SMP Laboratorium Unesa Tentang Peraturan Lalu Lintas | Pendidikan | Listyaningsih, S.Pd., M.Pd. Drs. I Made Suwanda, M.Si. Rahmanu Wijaya, S.H., M.H. | 0020027505 0009075708 0009118604 | III/c IV/a III/b | S-2 S-2 S-2 | P L L | 9 | 11.000.000 | UKT |
| 4 | FISH | PMP-KN | Pengembangan Lagu Anak Yang Digubah Untuk Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran PPKN Jenjang SD | Pendidikan | Dr. Harmanto, S.Pd., M.Pd. Dr. Totok Suyanto, M.Pd. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, M.A. Dr. Suharningsih, M.Si. | 0001047104 0004046307 0001037704 0001075303 | IV/a IV/b IV/b IV/a | S-3 S-3 S-3 S-3 | L L L P | 9 | 10.000.000 | UKT |
| 5 | FISH | Pend. Geografi | Pengembangan Prototype Sistem Informasi Dan Peringatan Dini Pencemaran Air Tanah Karst Berbasis Webgis | Pendidikan | Dr. Eko Budiyanto, S.Pd., M.Si. Dr. Nugroho Hari Purnomo, S.P., M.Si. Dr. Muzayanah, S.T., M.T. Dr. Soegiyanto, M.Si. Aida Kurniawati, S.Pd., M.Si. | 0025047408 0003097408 0016127003 0031035403 0005097404 | III/d III/c III/d IV/b III/c | S-3 S-3 S-3 S-3 S-2 | L L P L P | 9 | 9.000.000 | UKT |
| 6 | FISH | Pend. Geografi | Mitigasi Bahaya Kegaraman (Salinity Hazard) Air Tanah Dangkal Pesisir Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah | Pendidikan | Dr. Ketut Prasetyo, M.S. Drs. Bambang Hariyanto, M.Pd. Dian Ayu Larasati, S.Pd., M.Sc. Drs. H. Daryono, M.Si. Drs. Agus Sutedjo, M.Si. | 0012056012 0004026506 0028058803 0009035405 0020085904 | IV/a III/b III/b IV/c IV/a | S-3 S-2 S-2 S-2 S-2 | L L P L L | 9 | 12.500.000 | UKT |
| 7 | FISH | Sejarah | Pengembangan Model Assesmen Berbasis HOTS Untuk Membentuk Pola Berpikir Kritis Mahasiswa | Pendidikan | Dr. Agus Suprijono, M.Si. Prof. Dr. Sarmini, M.Hum. Dr. Sugeng Harianto, M.Si. | 0011016705 0008086803 0021036403 | IV/c IV/d IV/a | S-3 S-3 S-3 | L P L | 9 | 19.250.450 | UKT |
| 8 | FISH | Sejarah | Pengembangan Sumber Belajar Pendidikan Nilai Dan Karakter Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal Untuk Mengembangkan Karakter Mulia Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah FISH Unesa | Pendidikan | Drs. Agus Trilaksana, M.Hum. Drs. Artono, M.Hum. Riyadi, S.Pd., M.A. Thomas Nugroho Aji, S.IP., M.Si. | 0024126703 0004066508 0020068601 0014087303 | IV/a IV/a III/b III/a | S-2 S-2 S-2 S-2 | L L L L | 9 | 7.500.000 | UKT |

| No. | Fak. | Jurusan | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Tim Peneliti | NIDN | Gol | Pend. | L/P | Waktu (bln) | Dana (Rp.) | Sumber Dana |
|-----|------|---------------------|--|-------------|---|--|---|--|--|-------------|------------|-------------|
| 9 | FISH | Sejarah | Penelitian Pengembangan Laboratorium Sejarah Berbasis Media Visual Untuk Mata Kuliah/Mata Pelajaran Sejarah Hindu Budha Dalam Pembelajaran Sejarah | Pendidikan | Drs. Artono, M.Hum. Dr. Wisnu, M.Hum. Drs. Agus Trilaksana, M.Hum. Drs. Nasution, M.Hum., M.Ed., Ph.D. Thomas Nugroho Aji, S.IP., M.Si. Drs. Sumarno, M.Hum. Corry Liana, S.Pd., M.Pd. Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum. Rojil Nugroho Bayu Aji, S.Hum., M.A. Eko Satriya Hermawan, S.Hum., M.A. | 0004066508 0004056411 0024126703 0002086604 0014087303 0024046501 0015048201 0015026803 0002058504 0012118406 | IV/a IV/b IV/a IV/b III/a IV/b III/b III/d III/b III/b | S-2 S-3 S-2 S-3 S-2 S-2 S-2 S-2 S-2 S-2 | L L L L L L P P L L | 9 | 7.750.000 | UKT |
| 10 | FISH | Sejarah | Pengembangan Model Pengelolaan Sumber Daya Budaya Berbasis Masyarakat Di Kawasan Trowulan Kabupaten Mojokerto | Pendidikan | Drs. Yohanes Hanan Pamungkas, M.A. Dr. Sugeng Harianto, M.Si. Drs. Agus Trilaksana, M.Hum. | 0001016057 0021036403 0024126703 | III/d IV/a IV/a | S-2 S-3 S-2 | L L L | 9 | 9.000.000 | UKT |
| 11 | FISH | Administrasi Publik | Model Kolaborasi Governance Dalam Penerapan Etika Layanan Publik Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Berbasis Pelanggan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Dan Delta Tirta | Pendidikan | Dra. Meirinawati, M.AP. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si. | 0021056804 0028047101 0030057606 0029048701 0020049001 | IV/a III/d III/b III/b III/b | S-2 S-2 S-2 S-2 S-2 | P P L L L | 9 | 8.000.000 | UKT |
| 12 | FISH | Administrasi Publik | Pengembangan Model Three-Sectors Partnership Dalam Membangun City Branding Sparkling Surabaya Melalui Layanan Bus Surabaya Shopping And Culinary Track (SSCT) | Pendidikan | Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP. Trenda Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP. | 0019018306 0029077404 0023128303 0025108901 | III/c III/d III/c III/b | S-2 S-2 S-2 S-2 | P P P L | 9 | 9.000.000 | UKT |
| 13 | FISH | Administrasi Publik | Inovasi Model Elektronik Musrenbang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya | Pendidikan | Dr. Prasetyo Isbandono, S.Sos., M.Si. Dr. Agus Prastyawan, S.Sos., M.Si. Noviyanti, S.AP., M.AP. Yuni Lestari, S.AP., M.AP. Dian Arlupi Utami, S.Sos., M.AP. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. Gading Gamaputra, S.AP., MPA. | 0005037013 0026087105 0018118901 0013068501 0025017601 0023097908 0016068702 | III/d III/c III/b III/b III/d III/c III/b | S-3 S-3 S-2 S-2 S-2 S-2 S-2 | L L P P P P L | 9 | 8.000.000 | UKT |
| 14 | FISH | Administrasi Publik | Inovasi Model Pelibatan Pedagang Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Revitalisasi Pasar Wonokromo Surabaya) | Pendidikan | Dr. Agus Prastyawan, S.Sos., M.Si. Dr. Prasetyo Isbandono, S.Sos., M.Si. Dian Arlupi Utami, S.Sos., M.AP. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. Yuni Lestari, S.AP., M.AP. Gading Gamaputra, S.AP., MPA. Noviyanti, S.AP., M.AP. | 0026087105 0005037013 0025017601 0023097908 0013068501 0016068702 0018118901 | III/c III/d III/d III/c III/b III/b III/b | S-3 S-3 S-2 S-2 S-2 S-2 S-2 | L L P P P L P | 9 | 8.000.000 | UKT |
| 15 | FISH | Hukum | Model Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Dalam Membuat Perjanjian Bagi Hasil Dan Perjanjian Kerja Antara Pemilik, Penyewa Dan Penggarap Lahan Budidaya Ikan Bandeng Di Kabupaten Gresik | Pendidikan | Eny Sulistyowati, S.H., M.H. Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H. Nurul Hikmah, Lc., M.HI. Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn. Muh. Ali Masnun, S.H., M.H. | 0030076802 0003018102 0024058106 0019108103 0007088801 | III/c III/c III/b III/b III/b | S-2 S-2 S-2 S-2 S-2 | P L P L L | 9 | 8.000.000 | UKT |
| 16 | FISH | Hukum | Analisis Corporal Punishment Pada Tingkat Sekolah Dasar Untuk Mengantisipasi Kekerasan Di Sekolah | Pendidikan | Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Nurul Hikmah, Lc., M.HI. | 0027126003 0024058106 | IV/b III/b | S-3 S-2 | P L | 9 | 8.000.000 | UKT |

| No. | Fak. | Jurusan | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Tim Peneliti | NIDN | GoI | Pend. | L/P | Waktu (bln) | Dana (Rp.) | Sumber Dana |
|-------------------|------|-------------|---|-------------|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 17 | FISH | Hukum | Pengembangan Model Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan | Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. Tamsil, S.H., M.H. Hananto Widodo, S.H., M.H. Budi Hermono, S.H., M.H. Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H. | 0014117201 0003046209 0003067407 0019038002 0011028802 | III/c III/c III/c III/c III/b | S-2 S-2 S-2 S-2 S-2 | P L L L L | 9 | 10.000.000 | UKT |
| 18 | FISH | Hukum | Implementasi Gerakan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Masyarakat Jawa Timur | Pendidikan | Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H. Nurul Hikmah, Lc., M.Hl. | 0019067901 0010098105 0024058106 | III/b III/b III/b | S-2 S-2 S-2 | P L P | 9 | 8.000.000 | UKT |
| 19 | FISH | Hukum | Pengembangan Model Pengusahaan Dan Penatagunaan Tanah Pertanian Dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Petani Di Jawa Timur | Pendidikan | Tamsil, S.H., M.H. Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn. Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H. Dita Perwitasari, S.H., M.Kn. | 0003046209 0014117201 0019108103 0017098801 198906182018032002 | III/c III/c III/b III/b III b | S-2 S-2 S-2 S-2 S-2 | L P L P P | 9 | 10.000.000 | UKT |
| 20 | FISH | Ilmu Sosial | Pengembangan Model Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Lereng Gunung Kelud | Pendidikan | Katon Galih Setyawan, S.Sos., M.Sosio. Drs. Martinus Legowo, M.A. Drs. Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, M.Si. Refti Handini Listyani, S.Sos., M.Si. | 0016058703 0001015803 0015056504 0004098206 | III/b IV/b IV/b III/c | S-2 S-2 S-2 S-2 | L L L P | 9 | 8.000.000 | UKT |
| 21 | FISH | Ilmu Sosial | Pengembangan Model 'Lumbung Modal' Berbasis Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin | Pendidikan | Dr. Ari Wahyudi, M.Si. Arief Sudrajat, S.Ant., M.Si. Pambudi Handoyo, S.Sos., M.A. Farid Pribadi, S.Sos., M.Sosio. Diyah Utami, S.Sos., M.M. | 0010056510 0001057205 0024097604 0005118403 0023088008 | IV/c III/d III/c III/b III/b | S-3 S-2 S-2 S-2 S-2 | L L L L P | 9 | 9.000.000 | UKT |
| 22 | FISH | Ilmu Sosial | Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Melalui Urban Farming Di Surabaya | Pendidikan | Dr. Sugeng Harianto, M.Si. Drs. Martinus Legowo, M.A. Drs. Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, M.Si. Ali Imron, S.Sos., M.A. | 0021036403 0001015803 0015056504 0008088304 | IV/a IV/b IV/b III/c | S-3 S-2 S-2 S-2 | L L L L | 9 | 9.000.000 | UKT |
| 23 | FISH | Ilmu Sosial | Model Penyediaan Informasi Publik Pada Perguruan Tinggi Studi Komparasi Universitas Negeri Surabaya Dan Universitas Brawijaya | Pendidikan | Gilang Gusti Aji, S.I.P., M.Si. Mutiah, S.Sos., M.I.Kom. Awang Dharmawan, S.lkom., M.A. | 0001068804 0213018502 0005078802 | III/b III/b III/b | S-2 S-2 S-2 | L P L | 9 | 8.000.000 | UKT |
| 24 | FISH | Ilmu Sosial | Analisis Kualitas Pembelajaran Dalam Pencapaian Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi | Pendidikan | Dr. Danang Tandyonomanu, S.Sos., M.Si. Vinda Maya Setianingrum, S.Sos., M.A. Putri Aisyiyah Rachma Dewi, S.Sos., | 0006087109 0718058005 0720048401 | III/d III/b III/b | S-3 S-2 S-2 | L P P | 9 | 9.000.000 | UKT |
| Total Dana | | | | | | | | | | | 227.000.450 | |



Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kepala Biro Umum dan Keuangan

* BUDIARSO
NIP 196005131980101002

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 5 Maret 2018
Rektor,

ttd

WARSONO
NIP 196005191985031002